



# Paslon Pilih Serangan Udara

**JOGJA**—Kampanye hari pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di DIY pada Rabu (25/9) masih landai.

Lugas Subarkah, Jumali, Triyo Handoko,  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

- ▶ Masing-masing paslon mengaku masih menyusun jadwal kampanye.
- ▶ Bawaslu Kabupaten Kulonprogo juga mengaku belum mendapat surat pemberitahuan dari paslon.

Belum terlihat adanya aktivitas kampanye yang signifikan dari pasangan calon yang berlaga. Kampanye baru terlihat melalui baliho dan sosial media. Berdasarkan

pantauan *Harian Jogja*, beberapa baliho yang memuat foto paslon memang sudah tersebar di beberapa titik sejak sebelum masa kampanye. Dalam baliho-baliho tersebut

belum disematkan nomor urut atau ajakan langsung untuk memilih. Di media sosial (medsos), akun pribadi setiap paslon maupun

akun khusus kampanye dan akun komunitas pendukung mulai memproduksi konten. Kebanyakan konten tersebut baru berisi nomor urut, statmen paslon saat penetapan nomor urut dan ajakan untuk memilih. Masing-masing paslon mengaku masih menyusun jadwal kampanye.



▶ Halaman 10

## Paslon Pilih...

Ketua KPU Kota Jogja, Harsya Arysamodro, menuturkan mulai 25 September, sejumlah agenda kampanye bisa dimulai di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat terbuka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kampanye melalui media sosial.

Satu agenda baru bisa dilakukan mulai 10 November yakni iklan media masa baik cetak maupun elektronik. "Kampanye terbuka diatur oleh KPU Kota. Kampanye lainnya adalah mandiri paslon," ungkapnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Bantul. Ketua KPU Kabupaten Bantul, Joko Santosa, mengaku paslon belum banyak yang memaksimalkan hari pertama kampanye. Oleh karena itu, KPU Bantul berharap agar para paslon mengoptimalkan metode kampanye tatap muka. Apalagi, PKPU No.13/2024 tidak mengatur mengenai adanya zonasi kampanye pada Pilkada 2024. "Karena kalau diatur akan membatasi mereka. mereka bisa mendatangi pertemuan-pertemuan di tingkat RT dan itu tidak masalah. Sepanjang, mereka melakukan pemberitahuan kepada kepolisian. Karena mereka nantinya dapat STTPK [Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye] yang nanti ditembuskan ke KPU dan Bawaslu," kata Joko.

Hanya, kata Joko, sampai saat ini, para paslon masih mengalami kendala dalam hal tim kampanye. Sebab, hingga Rabu, belum ada yang mendaftarkan tim kampanye dari ketiga paslon. Padahal, sesuai dengan ketentuan, setiap paslon wajib melaporkan tim kampanye ke KPU. "Harusnya, kan, kemarin mereka sudah mendaftarkan tim kampanye, dan nanti memang harus diumumkan di laman KPU Bantul. Dan, sampai saat ini kami masih menunggu," katanya.

**Surat Pemberitahuan**  
 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo juga mengaku belum mendapat surat pemberitahuan dari paslon terkait dengan kampanye hingga Rabu sore. Padahal mestinya surat pemberitahuan itu bersifat wajib bagi paslon yang hendak kampanye.

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto, menyampaikan surat pemberitahuan itu mesti dibuat paslon dan tim pemenangnya lalu disampaikan ke Polres Kulonprogo dengan tembusan ke lembaganya dan KPU. "Kalau belum ada surat masuk kemungkinan tidak ada kampanye, mungkin mereka sedang merampungkan laporan dana kampanye," jelasnya.

Marwanto menegaskan pemberitahuan itu bersifat wajib, yang tak wajib jika paslon Pilkada atau timnya hanya menghadiri acara saja tanpa menawarkan diri, memberikan janji, atau menyampaikan visi-misi. "Kalau cuma hadir tapi tidak berbicara tidak perlu membuat surat pemberitahuan," ungkapnya.

Masa kampanye Pilkada Kulonprogo yang tanpa penjadwalan, jelas Marwanto, membuat Bawaslu Kulonprogo mesti kerja ekstra keras dalam pengawasannya. Sebabnya kemungkinan dua paslon berkampanye di lokasi yang sama dan hanya beda titik cukup besar terjadi. "Kami hanya punya satu petugas Panwaslu Kalurahan Desa [PKD] jika di satu kalurahan ada dua paslon kampanye rapat terbatas maka Panwaslu di kapanewon yang akan terjun membantu satu PKD tersebut," jelasnya.

Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana, mengonfirmasi tak adanya surat pemberitahuan kampanye yang masuk ke lembaganya untuk hari pertama kampanye ini. "Sampai sore ini [kemarin] belum ada yang masuk surat pemberitahuan kampanyenya," ujarnya.

Budi menyebut dana kampanye tiap paslon Pilkada Kulonprogo dibatasi maksimal Rp67 miliar. "Laporan dana awal kampanye itu sudah kami terima kemarin dan sedang diteliti, kami juga akan solisiasikan zonasi pemasangan APK [alat peraga kampanye]," katanya.

**Deklarasi Damai**  
 Sementara itu, hari pertama kampanye di Pilkada Sleman 2024 diisi dengan kegiatan deklarasi damai yang melibatkan pasangan calon dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) di Rocket Hall di Kalurahan Sidomoyo, Godean, Rabu.

"Baru sebatas deklarasi damai. Untuk kegiatan kampanye lain belum ada," kata anggota Bawaslu Sleman, Hery Purwito.

Menurut dia, ketentuan kampanye sudah diatur dalam PKPU No.14/2024. Hal inilah yang jadi dasar kampanye serta menjadi pedoman dalam pengawasan. "Masih sepi karena memang belum ada yang memberikan pemberitahuan untuk berkampanye," katanya.

Ia berharap kedua pasangan calon bisa tertib. Selain mematuhi deklarasi damai yang telah disepakati bersama, Hery juga meminta agar segera memberikan pemberitahuan berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. "Aturannya diharuskan memberikan tebusan ke Bawaslu dan yang lain," katanya.

Anggota KPU Sleman Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Huda Al Amna, mengatakan kampanye terdiri dari pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas dengan maksimal jumlah peserta 1.000 orang dan rapat umum. Huda mengakui pengaturan hanya menyangkut rapat umum yang setiap pasangan calon mendapatkan jatah sekali selama kampanye. "Untuk tatap muka dan pertemuan terbatas bisa dilakukan setiap hari," katanya.

Huda menambahkan KPU Sleman juga akan memfasilitasi pasangan calon untuk berkampanye. Selain fasilitas pemasangan alat peraga dan bahan kampanye, rencananya juga ada debat yang mempertemukan pasangan calon.

"Kami juga akan memfasilitasi iklan di media cetak dan elektronik mulai 10-23 November mendatang. Untuk debat, juga masih akan dikoordinasikan lebih lanjut," katanya.

Adapun, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menerima tembusan pemberitahuan tertulis kampanye untuk pasangan Sutrisna Wibawa-Sumanto dan Sunaryanta-Mahmud Ardi Widanto.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho, mengatakan Sutrisna-Sumanto menyerahkan pemberitahuan tertulis kampanye di dua tempat. Sementara itu, Sunaryanta-Mahmud Ardi Widanto menggelar sosialisasi atau kampanye tatap muka di satu tempat. (Andreas Yuda Pramono & David Kurniawan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005